

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan PERANGKAT DAERAH untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja KESBANGPOL) Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2021, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023.

Renja Kesbangpol Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Kesbangpol Tahun 2023 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Dengan demikian, Renja Kesbangpol Tahun 2023 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Oleh sebab itu, karena tahun 2023 merupakan tahun ke 6 (enam) pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perubahan Kantor Kesbangpol Tahun 2021-2026, maka untuk menyusun RKPD dan Renja Kesbangpol, harus mempedomani:

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,
- 2) RPJMN Tahun 2014-2022,
- 3) RPJPD Provinsi Sumbar 2005-2025
- 4) RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2022,
- 5) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025
- 6) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kesbangpol. Sebagai satuan kerja Perangkat Daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik mempunyai fungsi yang sangat strategis antara lain, Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Rancangan renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2005;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
31. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Kesbangpol tahun 2023 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kesbangpol adalah :

- 1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Kesbangpol.
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Kesbangpol dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kesbangpol disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (ANALISIS SWOT)

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam spm,

maupun terhadap ikk sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Suistanable Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PERANGKAT DAERAH dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
- 4) Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31.

2.5 PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Sajikan Tabel T-C.32

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1. Gambaran Umum Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pelaksanaan kegiatan Kesbangpol Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja Kesbangpol 2021, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kesbangpol Tahun 2021 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PERANGKAT DAERAH) Tahun 2021. Renja Kesbangpol pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023.

2. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

3. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan DPA Tahun Anggaran 2021, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman selaku SKPD memperoleh target alokasi anggaran belanja dengan rincian sebesar **Rp2.249.629.092,00** yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp 781.334.642,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp 511.784.450,00
- Belanja Modal Rp 0,00
- Belanja Hibah Rp 956.510.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Total Realisasi belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan hanya sebesar **Rp2.099.374.909,00** atau **93,32%** dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar **Rp2.249.629.092,00**. Realisasi belanja operasi sebesar **Rp2.099.374.909,00** atau **93,32%** dari anggaran belanja operasi yang ditetapkan sebesar **Rp2.249.629.092,00**. sedangkan realisasi belanja modal sebesar **Rp 0,00** atau **0%** dari anggaran belanja modal yang ditetapkan.

Seluruh realisasi belanja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 mencapai **93,32%** dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tiap program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

TABEL 2.1.
CAPAIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	781,334,642	705,587,145	75,747,497	90.31	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	739,424,642	665,167,145	74,257,497	89.96	Tersedianya Gaji dan Tunjangan
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41,910,000	40,420,000	1,490,000	96.44	Meningkatnya Kinerja Keuangan yang akuntabel selama 12 bulan
2	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	94,144,500	75,907,150	18,237,350	80.63	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,084,500	36,357,900	1,726,600	95.47	Tersedianya Renja dan Renstra
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16,860,000	14,050,000	2,810,000	83.33	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000	7,585,000	2,415,000	75.85	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,500,000	1,264,250	1,235,750	50.57	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,500,000	975,000	1,525,000	39.00	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,200,000	15,675,000	8,525,000	64.77	Tersedianya laporan LAKIP, LPPD, Renstra, RKA, DPA, Laporan Keuangan Semesteran pada OPD selama 1 tahun
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1,510,000	1,200,000	310,000	79.47	
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,510,000	1,200,000	310,000	79.47	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap dan handal
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	78,430,000	76,904,800	1,525,200	98.06	
	a. Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	13,579,200	1,420,800	90.53	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu selama 12 bulan
	b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	63,430,000	63,325,600	104,400	99.84	Terlaksananya koordinasi dengan dinas instansi terkait pada dalam daerah Kab. Padang Pariaman maupun luar daerah
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	254,532,200	252,821,700	1,710,500	99.33	
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28,674,900	27,690,400	984,500	96.57	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor selama 12 bulan
	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,820,000	6,250,000	570,000	91.64	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin/berkala OPD selama 12 bulan
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219,037,300	218,881,300	156,000	99.93	Meningkatnya kinerja Swakelola sebanyak 9 (sembilan) orang selama 12 bulan
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	39,822,000	36,008,814	3,813,186	90.42	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,822,000	36,008,814	3,813,186	90.42	Terpenuhinya jasa service, belanja penggantian suku cadang, pajak, BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas selama 12 bulan
JUMLAH PINDAH KE HALAMAN 02		1,249,773,342	1,148,429,609	101,343,733	91.89	

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PINDAHAN DARI HALAMAN 01	1,249,773,342	1,148,429,609	101,343,733	91.89	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	982,800,000	938,790,300		95.52	
	a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	982,800,000	938,790,300	44,009,700	95.52	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bantuan Dana Papol untuk Tahun 2021 sebanyak 10 Papol dan terealisasi sebanyak 9 Papol
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	10,550,000	10,450,000	100,000	99.05	
	a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing di Daerah	10,550,000	10,450,000	100,000	99.05	Terpantaunya dan terdatanya Keberadaan Ormas dan LSM di Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					
	<i>Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</i>	6,505,750	1,705,000		26.21	
	a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6,505,750	1,705,000	4,800,750	26.21	Terpantaunya Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah se - Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
	JUMLAH	2,249,629,092	2,099,374,909	150,254,183	93.32	

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan DPA Tahun Anggaran 2021, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariamanselaku Perangkat Daerah memperoleh target pendapatan dan alokasi anggaran belanja dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada Kesbangpol memiliki 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri atas 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp1,249.773.342,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp1.148.429.609,00**. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal inidapat dilihat dari realisasi belanja **91,89%**, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini ada 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp781.334.642,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp705.587.145,00** atau sebesar **90.31%**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran **Rp739.424.642,00** dan realisasi **Rp665.167.145,00** atau sebesar **89,96%**. Kegiatan Jasa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dimaksudkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada kantor kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2021.

2) **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Anggaran **Rp41.910.000,00** dan realisasi **Rp40.420.000,00** atau sebesar **96,44%**. Kegiatan ini sebagian besar merupakan penyediaan honorarium pengelola keuangan SKPD seperti Honor KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun 2020.

b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini ada 6 (enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp94.144.500,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp75.907.150,00** atau sebesar **80.63%**, dengan rincian sebagai berikut:

1) **Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**

Anggaran **Rp38.084.500,00** dan realisasi **Rp36.357.900,00** atau sebesar **95,47%**. Kegiatan ini meliputi jumlah dokumen renstra 2021 – 2026 dan jumlah dokumen renja 2022, dengan sisa dana sebesar **Rp1.726.600,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2021.

2) **Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD**

Anggaran **Rp16.860.000,00** dan realisasi **Rp14.050.000,00** atau sebesar **83,33%**. Kegiatan ini meliputi jumlah dokumen RKA SKPD, dengan sisa dana sebesar **Rp2.810.000,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2021.

3) **Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD**

Anggaran **Rp10.000.000,00** dan realisasi **Rp7.585.000,00** atau sebesar **75,85%**. Kegiatan ini meliputi jumlah dokumen perubahan RKA SKPD, dengan sisa dana sebesar **Rp2.415.000,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2021.

4) **Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD**

Anggaran **Rp2.500.000,00** dan realisasi **Rp1.264.250,00** atau sebesar **50,57%**. Kegiatan ini meliputi jumlah dokumen DPA SKPD, dengan sisa dana sebesar **Rp1.235.750,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2021.

5) **Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD**

Anggaran **Rp2.500.000,00** dan realisasi **Rp975.000,00** atau sebesar **39,00%**. Kegiatan ini meliputi jumlah dokumen perubahan DPA SKPD, dengan sisa dana sebesar **Rp1.525.000,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2021.

6) **Evaluasi kinerja perangkat daerah**

Anggaran **Rp24.200.000,00** dan realisasi **Rp15.675.000,00** atau sebesar **64,77%**. Kegiatan ini meliputi jumlah dokumen lakip, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dengan sisa dana sebesar **Rp8.525.000,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2021.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini hanya ada 1 (satu) sub kegiatan yaitu **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perndang-Undangan** dengan jumlah anggaran sebesar **Rp1.510.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp1.200.000,00** atau sebesar **79.47%**. Kegiatan ini untuk tersedianya sumber daya manusia (SDM) pada Kantor Kesbang dan Politik yang cakap dan handal dalam mengimplementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini ada 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp78.430.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp76.904.800,00** atau sebesar **98.06%**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Fasilitas Kunjungan Tamu

Anggaran **Rp15.000.000,00** dan realisasi **Rp13.579.200,00** atau sebesar **90,53%**. Penyediaan makanan dan minuman tamu selama tahun 2021 dapat disediakan. Penyediaan makanan dan minuman tamu pelaksanaannya sesuai dengan agenda kunjungan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Anggaran **Rp63.430.000,00** dan realisasi **Rp63.325.600,00** atau sebesar **99,84%**. Selama tahun anggaran 2021 Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah sesuai undangan serta *event* kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan ini ada 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp254.532.200,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp252.821.700,00** atau sebesar **99.33%**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran **Rp28.674.900,00** dan realisasi **Rp27.690.400,00** atau sebesar **96,57%**. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat dan lancarnya proses surat menyurat dan administrasi keuangan. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2021 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya surat menyurat, Tersedianya alat tulis kantor, barang cetakan, penggandaan (fotocopy), perangkat dan materai.

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran **Rp6.820.000,00** dan realisasi **Rp6.250.000,00** atau sebesar **91,64%**. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi perlengkapan kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan pada Tahun 2021.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran **Rp219.037.300,00** dan realisasi **Rp218.881.300,00** atau sebesar **99,33%**. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk meningkatnya target kinerja yang ditetapkan yaitu dengan pembayaran honor Tenaga Swakelola/Tenaga Kerja Non Pegawai sebanyak 9 (sembilan) orang.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini hanya ada 1 (satu) sub kegiatan yaitu **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas** dengan jumlah anggaran sebesar **Rp39.822.000,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp36.008.814,00** atau **90,42%**. Kegiatan ini untuk memenuhi jasa service, belanja penggantian suku cadang, pajak, BBM dan pelumas kendaraan dinas selama 12 (dua belas) bulan selama Tahun 2021.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	Bulan	739,424,642.00	665,167,145.00	89.96
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Bulan	41,910,000.00	40,420,000.00	96.44
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	Tahun	38,084,500.00	36,357,900.00	95.47
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Tahun	16,860,000.00	14,050,000.00	83.33
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	Tahun	10,000,000.00	7,585,000.00	75.85
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	Tahun	2,500,000.00	1,264,250.00	50.57
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	Tahun	2,500,000.00	975,000.00	39.00
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Tahun	24,200,000.00	15,675,000.00	64.77
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1	1	Tahun	1,510,000.00	1,200,000.00	79.47
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Bulan	15,000,000.00	13,579,200.00	90.53
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1	1	Tahun	63,430,000.00	63,325,600.00	99.84
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Bulan	28,674,900.00	27,690,400.00	96.57
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	Bulan	6,820,000.00	6,250,000.00	91.64
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan	219,037,300.00	218,881,300.00	99.93
15	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	12	12	Bulan	39,822,000.00	36,008,814.00	90.42
J u m l a h					1,249,773,342.00	1,148,429,609.00	91.89

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini hanya terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp982.800.000,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp938.790.300,00** atau

95,52%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan ini hanya ada 1 (satu) sub kegiatan yaitu **Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah** dengan jumlah anggaran sebesar **Rp982.800.000,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp938.790.300,00** atau **95,22%.** Kegiatan ini untuk terlaksananya pembinaan terhadap partai politik sebanyak 10 (sempuluh) partai politik, dan juga pengawasan terhadap dana hibah bantuan keuangan partai politik sebanyak 9 (sembilan) partai politik.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	10	9	Papol	982,800,000.00	938,790,300.00	95.52
J u m l a h					982,800,000.00	938,790,300.00	95.52

3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini hanya terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp10.550.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp10.450.000,00** atau **99,05%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan .

Kegiatan ini hanya ada 1 (satu) sub kegiatan yaitu **Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah** dengan jumlah anggaran sebesar **Rp10.550.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp10.450.000,00** atau **99,05%**. Kegiatan ini untuk terpantaunya dan terdatanya keberadaan ormas dan LSM di Kabupaten Padang Pariaman.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing di Daerah	12	12	Bulan	10,550,000.00	10,450,000.00	99.05
J u m l a h					10,550,000.00	10,450,000.00	99.05

4. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

Program ini hanya terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp6.505.750,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp1.705.000,00** atau **26,21%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial .

Kegiatan ini hanya ada 1 (satu) sub kegiatan yaitu **Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah** dengan jumlah anggaran sebesar **Rp6.505.750,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp1.705.000,00** atau **26,21%**. Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk terpantaunya gangguan dan keamanan, serta tertangani gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 1 (satu) tahun di 17 (tujuh belas) Kecamatan.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	12	Bulan	6,505,750.00	1,705,000.00	26.21
Jumlah					6,505,750.00	1,705,000.00	26.21

2.1.2. Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun 2021

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kantor Kesbangpol dan realisasi APBD dapat kita lihat secara lebih terperinci dalam matriks terlampir.

TABEL 2.17.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KESBANGPOL DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KESBANGPOL S/D TAHUN 2021
KABUPATEN PADANG PADANG PARIAMAN RIAMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.02.01.	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran						100	100	100
1.03.1.03.02.01.01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK, Materai, penggandaan dan cetak dokumen juknis kerja	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.03.1.03.02.01.07	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, Air, telepon & Faxsimile	12 Kali / Tahun	12 Kali / Tahun	0	0	0	0	0	100
1.03.1.03.02.01.08	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium Satuan pengelola keuangan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.03.1.03.02.01.15	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
1.03.1.03.02.01.17	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk 1 tahun.	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100	4 paket	4 paket	100
1.03.1.03.02.01.18	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.03.1.03.02.01.19	7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	8	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Pembayaran gaji tenaga swakelola sebanyak 4 orang								
1.03.1.03.02.02.	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi								
1.03.1.03.02.02.09	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	0	0	1 unit	1 unit	100	0	0	0
1.03.1.03.02.02.10	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (1 unit komputer dan 1 unit Laptop)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.03.1.03.02.01.24	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya mebeleur kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	100	100
1.03.1.03.02.01.26	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	100	100
1.03.1.03.02.05.	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Ketersediaan Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH								
1.03.1.03.02.05.03	13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur yang mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.02.06.	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Tepat Waktu								
			Tersusunnya dok TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan								
1.03.1.03.02.06.01	14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Persentase Laporan Tepat Waktu	10 dokumen	10 Dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	10 dokumen	100	100
	15	Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran OPD	Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Anggaran (RKA & DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun			4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	100	100
1.03.1.03.02.34.	V	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
1.03.1.03.02.34.08	15	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM	Terlaksananya rapat koordinasi FKDM dan Pembekalan FKDM	0	0	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
			Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan FKDM se								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.34.09	16	Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantramtibmas di Daerah)	1. Pelaksanaan operasional kegiatan kominda dalam pengendalian kantramtibmas	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	0	0	0
			2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama unit intelijen dalam mengatasi masalah kantrantibmas								
1.03.1.03.02.34.10	17	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	Terlaksananya operasional dan koordinasi tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen
			Terpantaunya dan tertanganinya konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.36.	VI	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara								
1.03.1.03.02.36	18	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Generasi muda yang mengikuti sosialisasi pewarisan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 Orang/tahun	100 Orang/tahun	0	0	0	0	0	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Meningkatnya wawasan generasi muda tentang nilai-nilai luhur bangsa								
1.03.1.03.02.36.04	19	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	70 Orang/tahun	70 orang/tahun	100
			Meningkatnya wawasan Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan								
1.03.1.03.02.36.08	20	Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan	0	0	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim
			Meningkatnya rasa toleransi antar suku bangsa								
1.03.1.03.02.39.	VI	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekati) lainnya								
1.03.1.03.02.39.01	21	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Meningkatnya kesadaran generasi muda akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.								
1.03.1.03.02.39.09	22	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman	Terlaksananya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.								
1.03.1.03.02.39.10	23	Operasional BNK	- Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun
			- Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman						126 Orang/Tahun	126 orang /tahun	
1.03.1.03.02.40.	VI	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah								
1.03.1.03.02.40.10	24	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan dana Partai Politik	Verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan parpol	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD								
1.03.1.03.02.40.10	25	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	33 Orang	0	33 Orang	33 Orang	100	0	0	100
			Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan pertanggung jawaban								100
1.03.1.03.02.40.10	26	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas/LSM	Terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	100
			1. Tersedianya data Ormas/LSM sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan								
			2. Terpantaunya aktifitas Ormas/LSM di Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.40.10	27	Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat.	Terlaksananya Dialog Politik Bersama Pimpinan Parpol dan Tomas	84 orang/tahun	84 orang/tahun	84 orang/tahun	84 orang/tahun	84 orang/tahun	0	0	100
			Terjalinnnya komunikasi antara pimpinan partai								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			politik dan tokoh masyarakat								
1.03.1.03.02.40.10	28	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013	Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2013 di Kabupaten Padang Pariaman	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	0	0	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan namun belum lagi optimal.

Melihat kondisi tersebut Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman selaku Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah sebagai lembaga teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan melalui :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesbang dan Politik sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kesbang dan Politik dapat kita lihat sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor KESBANGPOL Kabupaten Padang Pariaman

NO	Indikator	SPM/sta ndar nasional	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata n Analisi s
				Tahun 2015	Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Terwujudnya penyelenggaraa n sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan serta terciptanya pemilu yang berkualitas	Kegiatan pembinaa n politik daerah		2 Keg	4 Keg	5 Keg	2 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	
				13	13	13	13	13	13	13	11	
2	Meningkatkan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam kerangka NKRI	Kegiatan pembinaa n terhadap LSM, Ormas dan OKP		0 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	
				0 Keg	142	145	145	142	142	142	142	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pemeerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggara unsur pemerintahan daerah dalam urusan wajib yang di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sebagai satuan kerja Perangkat Daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK

RINGKASAN TUGAS :

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik menetapkan program kerja kantor dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor.
2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis kantor sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian daerah.
4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kepegawaian daerah.
5. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, fungsi dan pengadaan, mutasi kepegawaian, data dan pengembangan pegawai, disiplin dan pembenahan.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan kantor.
7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPD dan LPPD Kantor serta pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan diklat pimpinan diklat teknis.

8. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kepegawaian daerah.
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

RINGKASAN TUGAS :

Menyiapkan Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.
2. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

URAIAN TUGAS :

1. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program kantor.
2. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.
4. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.
5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
6. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan kantor.
7. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
8. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat.
9. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.

10. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional.
11. Menyelenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD kantor.
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
13. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. KEPALA SEKSI KESATUAN BANGSA

RINGKASAN TUGAS

Menyusun rencana, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa berdasarkan peraturan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1) URUSAN BIDANG BINA IDEOLOGI

- a. Melaksanakan program kerja bina ideologi.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bina ideologi.
- c. Melaksanakan Penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan bina ideologi.
- d. Melaksanakan pengelolaan data bina ideologi.
- e. Melaksanakan bahan koordinasi bina ideologi.
- f. Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

2) URUSAN BINA WAWASAN KEBANGSAAN

- a. Melaksanakan program kerja Bina Wawasan Kebangsaan.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bina Wawasan Kebangsaan.
- c. Melaksanakan Penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan Bina Wawasan Kebangsaan.
- d. Melaksanakan pengelolaan data Bina Wawasan Kebangsaan.
- e. Melaksanakan bahan koordinasi Bina Wawasan Kebangsaan.

- f. Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

3) URUSAN KEWASPADAAN

- a. Melaksanakan pengkajian program kerja bina Kewaspadaan.
- b. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis bina Kewaspadaan.
- c. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi kewaspadaan.
- d. Melaksanakan fasilitasi kewaspadaan.
- e. Melaksanakan koordinasi kewaspadaan.
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kewaspadaan.
- g. Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi koordinasi kewaspadaan.
- i. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- k. Menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan.
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. KEPALA SEKSI PEMBINAAN POLITIK

RINGKASAN TUGAS :

Menyusun rencana, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Politik, serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Pembinaan Politik berdasarkan peraturan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan politik.
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan politik.
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik.
4. Melaksanakan pengelolaan data fasilitasi parpol pembinaan politik.
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitas parpol.
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi fasilitasi parpol.
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pembinaan politik.
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembinaan politik.
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam ruang lingkup kedinasan.

5. KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**RINGKASAN TUGAS :**

Menyusun rencana, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga, menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
4. Melaksanakan pengelolaan data fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitas Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.

7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam ruang lingkup kedinasan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan PERANGKAT DAERAH lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, eselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

TABEL 2.2
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No	Golongan	Jumlah
1	IV	1
2	III	5
3	II	1
4	I	0
	Jumlah	7 Orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kesbangpol April Tahun 2022

Komposisi pejabat eselonering di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

TABEL 2.3
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN ESSELONERING

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	4
	Jumlah	5 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kesbangpol Tahun 2022

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya sumberdaya Manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Kantor Kesbangpol.
2. Jumlah pegawai Kantor Kesbangpol yang telah memiliki Sertifikat pengadaan barang/jasa masih sedikit.
3. Adanya keterlambatan regulasi baik ditingkat pusat maupun Provinsi dan Kabupaten, sehingga dalam penyusunan dokumen pelaksana anggaran (DPA) PERANGKAT DAERAH yang sudah ditetapkan harus dirubah dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru.
4. Belum optimalnya dokumen perencanaan dari personil yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dibidang perencanaan sebelumnya.
5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dan telah banyaknya yang rusak tidak dapat mencapai hasil yang di harapkan ini disebabkan sebagian dari Sarana dan Prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak dan untuk mengoperasikan membutuhkan dana yang besar.

Adapun dampak dengan adanya permasalahan diatas adalah tidak maksimalnya perencanaan, penganggaran serta realiasi pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk kedepan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada maka dari itu semua personil saling membantu dalam pelaksanaan semua kegiatan. Dan berikut formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah : Setiap kasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan masing – masing untuk mempersiapkan kerangka acuan kerja (KAK) nya terlebih dahulu yang memuat tentang detail rencana pelaksanaan kegiatan seperti : Maksud dan tujuan, RKA masing-masing kegiatan, jadwal pelaksanaan sampai dengan pihak terkait dengan kegiatan tersebut.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 disusun dengan mempedomani 1). RPJPN tahun 2005 – 2025, 2). RPJMN 2017-2022, 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005 – 2025, 4). RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005 – 2025, 5). RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 -2021, 6). Renstra Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Paddag Pariaman Tahun 2021 – 2026. Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (hasil Musrenbang)

Rencana kerja (Renja) Kantor Kesbangpol tahun 2023 merupakan rencana kerja akan disusun untuk dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangpol (Renstra Kesbangpol) tahun 2021 – 2026, Renja Kantor Kesbangpol disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan pada Rencana Kerja pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indikator makro. Indikator ekonomi dan sosial.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan sinergitas perencanaan mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan Perangkat Daerah, maka tahun 2023 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak ada usulan skala prioritas dari hasil musrenbang. Adapun program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana tahun 2023 berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, maka tema RKP Tahun 2023 adalah ***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural***.

RKP tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama. Mencakup percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Program Prioritas Nasional antara lain : 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan kebijakan mengurangi ketimpangan antar wilayah, 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan, 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental, 5. Memperkuat infrastruktur, mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan 7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan public.

Dalam penyusunan Renja Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Kantor Kesbangpol Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Matrik Keterkaitan Antara RPJPN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

Visi Misi RPJPN Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Indonesia Yang Manadiri, Maju, adil dan Makmur</i>		<i>Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi " <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> ",	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2	Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3	Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan " <i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i> "

5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari			6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional				
8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional				

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 karena tahun 2023 merupakan tahun kedua dari periode kedua pelaksanaan RPJMD (Tahun 2021-2026) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPD Tahun 2023 maka tema RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan SDM Berkualitas Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berkualitas dan prioritas pembangunan adalah:

Tabel 3.4

Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman 2023

Tema Pembangunan Padang Pariaman Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan SDM Berkualitas Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah
	Peningkatan potensi sector pariwisata unggulan, ekonomi kreatif dan investasi daerah
	Peningkatan Produktifitas sector pertanian, peternakan dan perikanan
	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah
	Meningkatkan mutu sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing

	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana public yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan profesional
	Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja Kantor Kesbang dan Politik tahun 2023 sesuai dengan prioritas yang ke delapan yaitu *Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah* maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA (THN)				
				2016	2017	2020	2020	2022
1		2	3	7	9	11	13	14
1	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	0%	0%	0%	75%	78%
		Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	55%	60%	60%	60%	60%
		Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	11 partai politik	11 partai politik	11 partai politik	13 partai politik	13 partai politik
2	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran dan	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Jumlah kasus Narkoba di tengah masyarakat.	54	36	33	30	25

	penyalahgunaan Narkoba dan Miras							
4	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Pemahaman, Kesadaran dan Fasilitasi Kehidupan Berpolitik.	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.	1. Mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman, langsung, umum, bebas dan rahasia 1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah 2. Peningkatan peran dan Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan & kehidupan politik serta perluasan system informasi politik 3. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat 4. Peningkatan peran & kapasitas pengurus parpol dalam sistem politik

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	1. Memasyarakatkan pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip HAM beserta peraturan perundangannya kepada masyarakat 2. Peningkatan pembinaan dan fasilitas terhadap ormas / LSM 3. Peningkatan peran & kapasitas pengurus ormas sebagai mitra pemerintah
		Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	1. Melakukan Pembinaan kepada partai politik tentang tata kelola keuangan 2. Melakukan bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. 3. Memberikan pemahaman kepada pengurus partai politik tentang aturan dan perundangan untuk tata kelola keuangan dan pencairan bantuan. 4. Memberikan arahan kepada partai politik untuk mematuhi aturan yang berlaku

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan terhadap Gangguan yang Timbul di Masyarakat.	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.	1. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas 2. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas 3. Meningkatkan kemampuan Dan ketrampilan aparat intelijen
Meningkatkan Partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	Menurunnya kasus Narkoba ditengah masyarakat.	1. Meningkatkan koordinasi antar unsur pemberantas narkoba 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini penyalahgunaan narkoba 3. Meningkatkan kualitas penyuluhan tentang bahaya narkoba 4. Tindak lanjut hasil pelaksanaan test urine
Mewujudkan yang memiliki pemahaman tentang nilai – nilai Wawasan Kebangsaan.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Menggali & memantapkan kembali rasa Cinta tanah air & bangsa, kesadaran bela negara, seni & budaya dalam kehidupan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			masyarakat 3. Menyertakan elemen Masyarakat dalam pembinaan / seminar / sosialisasi tentang wawasan kebangsaan & bela negara

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin Perangkat Daerah, pada tahun 2023 Kantor Kesbang dan Politik menyelenggarakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yang secara keseluruhan meliputi 6 program dan 12 kegiatan dan 36 Sub kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2023 sebesar **Rp4,735,698,406,-**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2023 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 matriks berikut ini :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATT PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kesbangpol	20%	2,119,188,406	DAU		Kesbangpol		2,084,188,406
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				DAU				
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra, renja	Kesbangpol	2 Dokumen	20,000,000	DAU		Kesbangpol	2 Dokumen	20,000,000
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	Kesbangpol	1 Dokumen	10,000,000	DAU		Kesbangpol	1 Dokumen	20,000,000
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA perubahan	Kesbangpol	1 Dokumen	10,000,000	DAU		Kesbangpol	1 Dokumen	20,000,000
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA	Kesbangpol	1 Dokumen	5,000,000	DAU		Kesbangpol	1 Dokumen	20,000,000
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA perubahan	Kesbangpol	1 Dokumen	5,000,000	DAU		Kesbangpol	1 Dokumen	20,000,000
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen LPPD, lakip, Lap Capkin	Kesbangpol	3 Dokumen	30,000,000	DAU		Kesbangpol	3 Dokumen	35,000,000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		

		Perangkat Daerah								
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	Kesbangpol	1 Perangkat Daerah	725,616,980	DAU		Kesbangpol	1 Perangkat Daerah	725,616,980
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Kesbangpol	12 bulan	53,640,000	DAU		Kesbangpol	12 bulan	53.640.000
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		
8.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kesbangpol	18 orang		DAU		Kesbangpol	18 orang	15,000,000
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Kantor Kesbangpol yang mengikuti Diklat Formal atau Teknis	Kesbangpol	10 orang	8.320,000	DAU		Kesbangpol	10 orang	50,000,000
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	Kesbangpol	10 orang		DAU		Kesbangpol	10 orang	50,000,000
8.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan	Kesbangpol	10 orang	15,670,000	DAU		Kesbangpol	10 orang	50,000,000

		Daerah								
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol	25 buah	20,000,000
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol	1 unit	20,000,000
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol	200 buah	20,000,000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol	100.000 lembar	20,000,000
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol	1100 Exemplar	30,000,000
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kesbangpol	300 porsi/kotak	15,000,000	DAU		Kesbangpol	600 porsi/kotak	20,000,000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kesbangpol	325 orang hari	62,200,000	DAU		Kesbangpol	1000 orang hari	100,000,000

8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol	1 tahun	-
8.01.01.2.06.05	Pengadaan Mebelur	Jumlah Paket Mebel	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol	1 tahun	20,000,000
8.01.01.2.06.16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin	Kesbangpol	1 Unit laptop + printer	25,000,000	DAU		Kesbangpol	1 tahun	40,000,000
8.01.01.2.06.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol	1 tahun	40,000,000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di arsipkan	Kesbangpol	750 Arsip surat	29,973,050	DAU		Kesbangpol	1100 Arsip surat	40,000,000
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	12 bulan	10,880,000	DAU		Kesbangpol	12 bulan	40,000,000
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Kesbangpol	12 bulan	244,184,260	DAU		Kesbangpol	12 bulan	300,000,000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		

8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Kesbangpol	12 bulan	52,863,000	DAU		Kesbangpol	12 bulan	75,000,000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	Kesbangpol	88%	50,000,000	DAU		Kesbangpol		165,000,000
8.1.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		
8.1.02.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Kesbangpol	150 orang	50,000,000	DAU		Kesbangpol	150 orang	80,000,000
		Jumlah Kegiatan PPWK, GNRM	Kesbangpol	1 kali		DAU		Kesbangpol	1 kali	85,000,000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	Kesbangpol	88%	1,286,510,000	DAU		Kesbangpol		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan		Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		

	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan partai politik yang di verifikasi	Kesbangpol	10 Dok	33,030,000	DAU		Kesbangpol	10 Dok	50,000,000
		jumlah dana hibah bantuan keuangan partai politik **)	Kesbangpol	10 parpol	956,510,000	DAU		Kesbangpol	10 parpol	956,510,000
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Kesbangpol	30 orang	75,245,000	DAU		Kesbangpol	30 orang	80,000,000
		Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu	Kesbangpol	150 orang	50,750,000	DAU		Kesbangpol	150 orang	75,000,000
		Fasilitasi Pemantauan Pemilu	Kesbangpol	1 Dokumen		DAU		Kesbangpol	1 Dokumen	250,000,000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas/keompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	Kesbangpol	88%	18,467,500	DAU		Kesbangpol		70,000,000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum		Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		

	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	Kesbangpol	1 kali	18,467,500	DAU		Kesbangpol	1 kali	25,000,000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Keormasan	Kesbangpol	1 kali		DAU		Kesbangpol	1 kali	50,000,000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pelaksanaan penanganan jumlah kasus narkoba menurun	Kesbangpol	88%	104,891,630	DAU		Kesbangpol		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Kesbangpol	1 kali	54,341,630	DAU		Kesbangpol	1 kali	50,000,000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman	Kesbangpol	1 kali	50,550,000	DAU		Kesbangpol	1 kali	120,000,000
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Pelaksanaan kegiatan P4GN	Kesbangpol	1 kali		DAU		Kesbangpol	1 kali	175,000,000

	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Kesbangpol	85%	230,241,883	DAU		Kesbangpol	88%	750,000,000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Kesbangpol			DAU		Kesbangpol		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	[1] Rapat Tim FKDM [2] Rakor FKDM [3] Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	Kesbangpol	6 kali	40,536,750	DAU		Kesbangpol	6 kali	450,000,000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*)	[1]Jumlah Rakor Forkopimda [2] Jumlah Rapat Forkopimda [3] Monitoring isu strategis di daerah dan pelaksanaan forkopimda kabupaten*)	Kesbangpol	[1] 2kali [2] 12 kali [3] 17 Kec. Di Kab. Pdg Prm dan 19 Kab/Kota	189,705,133	DAU		Kesbangpol	48 kali	300,000,000
JUMLAH SESUAI PAGU					2,842,483,303	JUMLAH PAGU				
jumlah pagu + *					2,842,483,303	jumlah pagu + *				
Jumlah pagu + * + **					2,842,483,303	Jumlah pagu + * + **				

**BAB IV
PENUTUP**

RENJA Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkanakan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang, April 2022
Pt. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATAEN PADANG PARIAMAN

SADRIL, S.Sos. M.M
NIP. 19650204 198603 1 002